

### DAFTAR PUSTAKA

- AAGN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko, “*Membangun Good Governance Di Desa*” (IRE Press, Yogyakarta,2003)
- Abdur Rozaki, dkk, “Desa, Otonomi dan Desentralisasi”, (Yogyakarta, IRE Press, 2005)
- Abu Daud Busroh, Ilmu Negara (Jakarta, Bumi Aksara,1993)
- Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dab Hukun*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2007)
- Ateng Syafrudin, *Kapita Selekta; Hakikat Otonomi dan Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta,Citra media, 2006)
- Amarah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah* (Bandung, Alumi, 1978)
- Andi Mustaripide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 1999)
- Bagir Manan, “*Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*”, Cetakan Pertama (Jakarta, Sinar Harapan, 1994)
- ....., “*Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*,” (Yogyakarta, PSH UII, 2001)
- Binarto, *Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1989)
- Budi Baik Seregar, Wahono (penyunting), *Kembali Ke Akar; Kembali Ke Konsep Otonomi Masyarakat Asli*, (Jakarta, Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat, 2002)
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, cetakan kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia; Hukum Administrasi Daerah*, cetakan kedua (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2004)
- Dan Sugandha, *Masalah Otonomi dan Hubungan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Bandung, CV Sinar Baru)

- Dadang Julianta, *Arus Bawah Demokrasi; Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Cet.I (yogyakarta, Lapera Pustaka Utama,2000)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002,
- Fahmi Amrusyi, *Otonomi Dalam Negara Kesatuan*, dalam Abdurrahman (editor), *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, (jakarta, Media Sarana Press, 1987)
- G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli, *Decentralization and Development*, (California, SAGE-Publications, 1983)
- H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Bandung, PT Rajagrafindo)
- Hanif Nurholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta, Erlangga, 2011)
- Hans Kalsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cet. ke-14 (Bandung, Nusa Media, 2014)
- Ina E. Slamet, dikutip dari Suhartono Dkk, “*Politik Lokal; Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*”, (Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001)
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994)
- ....., *Konstitusi dan Konstitualisme*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2006)
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung, Alumni, 2004)
- Koentjaraningrat, *Masalah-Masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan*, dikutip dari Heny Setyowati, *kedudukan Peraturan Desa Sebelum dan Setelah Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa*, Tesis UII, 2014
- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet ke-5 (Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara, FH UI,1983)

- Kushandajani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Sosial-Legal*, (Semarang, Jurusan Ilmu Politik FISIP UNDIP, 2008)
- Moh. Yamin, “*Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*” dikutip dari Ni’matul Huda, “*Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*” Cetakan Pertama (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005)
- Mohammad Hatta, dikuti dari, Suhartono Dkk, “*Politik Lokal; Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*”, (Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001)
- Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia, 2008)
- Mahfud MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 1993)
- Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, cetakan I (Yogyakarta, PolGov Fisipol UGM, 2013)
- M. Solly Lubis, *Hukum Tatanegara*, cet.V (Jakarta, Mandar Maju, 1992)
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah; Kajian Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*, Yogyakarta, UII Press, 2006
- Ni’matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Grafindo Persada, 2005)
- ....., “*Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan I (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005)
- ....., “*Hukum Pemerintahan Daerah*”, (Bandung, Nusa Media, 2009)
- ....., “*Hukum Pemerintahan Desa; Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*”, (Setara Press, Malang, 2015)
- Pratikno, “*Desentralisasi Pilihan Yang Tidak Pernah Final*” dalam buku “*Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*”, Editor. Abdul Gaffar Karim. Cet III (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011)
- Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, cet, II (Yogyakarta, BPFE, 2004)

- ....., *Ilmu Negara* (Yogyakarta, Liberty, 2000)
- Sutoro Eko dkk, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, (Yogyakarta, IRE Press, 2005)
- Sunaji Zamroni, dkk. *Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan*, (Yogyakarta, IRE Press, 2015)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*”, (PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Sri Soemantri M. *Pengantar Perbandingan Antara Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Rajawali Press, 1981)
- Syaukani HR, Afan Gaffar dan M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002).
- The Liang Gie, *Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-undang Tentang Pokok Pemerintahan Daerah Indonesia*, (Yogyakarta, Karya Kencana, 1997)
- Tri Ratnawati, “*Desentralisasi Dalam Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia Di Masa Transisi; Kasus UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*” dalam buku “*Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*”, Editor. Abdul Gaffar Karim. Cet III (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011)
- Tunmer, Mark and Hume, David, “*Governance, Administration and Development*”, (London, MacMillan LTD, 1990)

### **Referensi Peraturan Perundang-undangan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

4. Undang-undang No.12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah perubahan kedua (revisi) atas Undang-undang sebelumnya.
5. Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
7. Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
8. Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa
9. Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
10. Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2015, (revisi) Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

### **Referensi Penelitian, dan Jurnal**

- Zen Zanibar, *Otonomi Desa Dengan Acuan Khusus Pada Desa Di Propinsi Sumantera Selatan*, Desertasi ( FH Universitas Indonesia, 2003)
- Nukthoh Arfa Wie Kurde, *Peranan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Penguatan Integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia; Analisis Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD 1945*, Desertasi (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2011)
- Bhenyamin Hoessein, *Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II* , Desertasi, Pasca Sarjana Universitas Indonesia,1993

Ita Iryanti “*Implementasi Otonomi Desa Menurut UU No. 32 Tahun 2004; Studi Kasus Penerapan Otonomi Desa di Desa Sendayan dan Desa Kampung Panjang Kec. Kampar Utara Kabupaten Kampar Propinsi Riau*, Tesis, (yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2008)

Zayanti Mandasari, *Politik Hukum Pemerintah Desa; Studi Perkembangan Pemerintahan Desa di Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi*, Tesis (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2015)

Djamilah, *Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir Setelah Berlakunya UU No.32 Tahun 2004*, TESIS (yogyakarta, FH UII, 2008)

Ni'matul Huda, *Berkayuh Diantara Bentuk Negara Kesatuan Dan Federal*, Jurnal Konstitusi PSHK UII, Vol.1., No.01

Jazim Hamidi, *Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah (Studi Atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik)*. Jurnal Hukum UII. Vol.18. No.3.18 Juli 2011.

### **Risalah Sidang**

Risalah Sidang Pansus RUU Tentang Desa, jenis Rapat Dengar Pendapat Umum, masa persidangan IV, Tahun 2011-2012, Ruang Pansus B, tempat Nusantara II It.3, DPR RI. Kamis, 24 Mei 2012 .

Risalah Laporan Singkat Pansus RUU Tentang Desa, Jenis Rapat Dengar Pendapat Umum, masa persidangan I, Tahun 2013-2014, Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II It.3, DPR RI. Selasa, 1 Oktober 2013.

**Referensi Media**

Aang Kusmawan, "*Mengukur Kemandirian Desa*", Opini Kompas 8 Mei  
2015

Ismail Hasani, "*Mantra Membangun Desa*", Opini Kompas 22 April, 2015

"*Hentikan Berebut Dana Desa*", Republika, 6 Januari 2015